

BAB IV

PEMBAHASAN

Pada bab ini seluruh data yang telah didapatkan selama proses penelitian dianalisis sesuai dengan fokus kajian penelitian. Data tersebut diperoleh dengan melakukan wawancara berdasarkan *interview guide*, observasi, dan dokumentasi terhadap fenomena-fenomena yang berkaitan dengan judul penelitian. Pembahasan ini menjawab tujuan penelitian Analisis *Stakeholders* (Aktor Kebijakan) dalam Pengembangan Obyek Wisata Candi Gedongsongo di Kabupaten Semarang.

4.1 Efektifitas Peran *Stakeholders* dalam Pengembangan Obyek Wisata Candi Gedongsongo di Kabupaten Semarang

Barbara C. Farhar dan William M. Babiuch dalam Modul *Stakeholders Analysis Methodologies Resource Book* (1994:3), analisis *stakeholders* adalah proses untuk mengidentifikasi berbagai macam jenis peran yang terdapat kemungkinan terpengaruh oleh pemerintah. Analisis *stakeholders* adalah salah satu cara untuk mengetahui bagaimana *stakeholders* sebagai aktor kebijakan menjalankan tugasnya, dimana didalam analisis ini dapat dilihat tingkat kepentingan, pengaruh dan bagaimana keterlibatan mereka dalam suatu kebijakan atau program. Berdasarkan Modul *Stakeholders Analysis Methodologies Resource Book*, analisis *stakeholders* penting dilakukan untuk (a) Menggambarkan dan mengelompokkan *stakeholders*; (b) Mengidentifikasi kemungkinan konflik; (c) Identifikasi viabilitas; (d) Menggambarkan keseluruhan potensi; (e) Mengidentifikasi Hubungan atau jejaring. Penelitian ini menggunakan tahapan

analisis *stakeholders* dari jurnal *Project Cycle Management, Tearfund Roots Resources* dimana pada teori ini terdapat beberapa tahapan dalam menganalisis *stakeholders* dan peran dari masing-masing *stakeholders*. Analisis yang dilakukan digunakan dalam rangka melihat efektifitas peran *stakeholders* dalam pengembangan obyek wisata Candi Gedongsongo.

4.1.1 Analisis Stakeholders dalam Pengembangan Obyek Wisata Candi Gedongsongo

Identifikasi *stakeholders* berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan terdapat tujuh *stakeholders* yang ikut andil dalam pengelolaan dan pengembangan obyek wisata Candi Gedongsongo, setiap *stakeholders* memiliki peran masing-masing dalam pengembangan obyek wisata Candi Gedongsongo di Kabupaten Semarang. *Stakeholders* yang terkait pengelolaan dan pengembangan obyek wisata Candi Gedongsongo antara lain: (a) Dinas Pariwisata (DISPARTA) Kabupaten Semarang; (b) BPCB Jawa Tengah; (c) Perum Perhutani Jawa Tengah; (d) Penjaga Tiket di Candi Gedongsongo; (e) Kelompok Juru Parkir, Pedagang, Penyewaan Kuda (Warga Sekitar) di Candi Gedongsongo, (f) Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (BARENLITBANGDA) Kabupaten Semarang, (g) Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Semarang.

Pada penelitian ini analisis dilakukan kepada beberapa pihak yang ikut terkait dalam pengembangan obyek wisata Candi Gedongsongo dan terdapat beberapa pihak yang terikat dan terkait dalam pengembangan obyek wisata Candi Gedongsongo. *Stakeholders* yang terikat dan terkait ada tiga *stakeholders*, dimana pengikat *stakeholders* tersebut adalah perjanjian kerjasama. Perjanjian Kerjasama

Nomor 415.4/01.1/KJS/2015 tentang Pemanfaatan Aset dan Bagi Hasil Retribusi Karcis Masuk di Objek Wisata Budaya Candi Gedongsongo Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah antara Pemerintah Kabupaten Semarang yang diwakili oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang, BPCB Jawa Tengah, dan Perum Perhutani Jawa Tengah. Tiga *stakeholders* yang ikut terlibat dalam pengembangan obyek wisata Candi Gedongsongo memang tidak terikat perjanjian secara langsung, seperti BARENLITBANGDA, DPU, dan warga sekitar tidak terikat perjanjian tetapi termasuk *stakeholders* karena dalam proses pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan ketiganya ikut berada didalam proses tersebut.

Peran *stakeholders* berdasarkan identifikasinya berbeda-beda setiap *stakeholders*. Tahapan dalam proses analisis ini yaitu: (a) Tingkat Ketertarikan *Stakeholders*, (b) Pengaruh dan Kepentingan *Stakeholders*, dan (c) Identifikasi Peran *Stakeholders*, setiap *stakeholders* memiliki kewenangan serta peran yang tidak sama. Ada yang memiliki peran dan wewenang dapat mempengaruhi *stakeholders* lain dan ada pula yang memiliki kepentingan besar tetapi pengaruh kecil. Berikut tahapan analisis *stakeholders* untuk melihat efektifitas peran *stakeholders* dalam pengembangan obyek wisata Candi Gedongsongo:

1. Tingkat Ketertarikan *Stakeholders*

Tahapan awal yang digunakan untuk melihat siapa saja *stakeholders* yang ikut andil dalam pengelolaan dan pengembangan Candi Gedongsongo. Tahapan ini melihat bagaimana ketertarikan setiap *stakeholders* yang tidak sama satu sama lain dan bagaimana pengaruh ketertarikan itu pengelolaan dan pengembangan Candi Gedongsongo. Dari tahap *stakeholders* yang ada dibedakan menjadi

stakeholders primer dan *stakeholders* sekunder. Menurut Clarkson dalam *Gabler Edition Wissenschaft* (2008:6) *stakeholders* primer adalah pihak dimana tanpa keterlibatannya yang berkelanjutan organisasi tidak dapat bertahan. Pada penelitian ini yang dimaksud dengan *stakeholders* primer adalah mereka/pihak yang selalu ada pada setiap tahapan pengembangan. *Stakeholders* sekunder adalah pihak yang mempengaruhi atau dipengaruhi oleh organisasi, *stakeholders* ini dalam penelitian pengembangan obyek wisata Candi Gedongsongo adalah pihak yang ikut mempengaruhi tetapi tidak ikut dalam setiap pengembangan dan banyak terlibat dalam pengembangan obyek wisata Candi Gedongsongo.

Tabel 4.1 Tabel Tingkat Ketertarikan Stakeholders

STAKEHOLDERS (Aktor Kebijakan)	KETERTARIKAN	PENGA- RUH		PRIORI TAS
		+	-	
Primer 1. Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang	a) Mengelola Obyek Wisata Candi Gedongsongo supaya lebih baik	+		5
	b) Mengembangkan fasilitas (sarana dan prasarana) Obyek Wisata Candi Gedongsongo	+		4
	c) Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	+	-	3
	d) Membuka lapangan pekerjaan untuk warga sekitar	+		4
2. BPCB Jawa Tengah	a) Menjaga peninggalan sejarah yang ada di Candi Gedongsongo	+		3
	b) Mengelola perawatan candi dan sekitar candi di kawasan wisata	+		4

<i>STAKEHOLDERS</i> (Aktor Kebijakan)	KETERTARIKAN	PENGA- RUH		PRIORI TAS
		+	-	
3. Perum Perhutani Jawa Tengah	a) Mengelola hutan yang ada di sekitar Candi Gedongsongo	+	-	2
	b) Mengembangkan potensi penggunaan hutan sebagai daya tarik wisata Candi Gedongsongo	+		4
	c) Menjaga kelestarian hutan yang ada di sekitar Candi Gedongsongo	+		5
4. Perwakilan Paguyuban Juru Parkir, Pedagang dan Penyewa Kuda (Warga Sekitar) di Candi Gedongsongo	a) Merasa memiliki kawasan wisata Candi Gedongsongo	+	-	4
	b) Mendapatkan lapangan pekerjaan lebih di sekitar kawasan wisata		-	2
	c) Meningkatkan ekonomi keluarga (masyarakat)		-	2

STAKEHOLDERS (Aktor Kebijakan)	KETERTARIKAN	PENGARUH		PRIORITAS
		+	-	
Sekunder				
5. Pegawai Pengelola Tiket Candi Gedongsongo	a) Melayani pengunjung dengan baik dan sesuai dengan Sapta Pesona	+		5
6. BARENLITBA NGDA Kabupaten Semarang	a) Memberikan dukungan pengelolaan dan pengembangan obyek wisata Candi Gedongsongo	+		4
	b) Mengefektifkan penggunaan dana dalam pengembangan Obyek Wisata Candi Gedongsongo	+	-	4
7. DPU Kabupaten Semarang	a) Memberikan ide dalam pengembangan obyek wisata Candi Gedongsongo	+		5

Sumber: Jurnal *Project Cycle Management, Tearfund Roots Resources*

Jurnal *What To Do When Stakeholders Matter* oleh John M. Bryson (2004:23) menyatakan analisis *stakeholders* sangat penting dilakukan saat ini karena meningkatnya keterkaitan keadaan di pemerintahan dunia. Memilih berbagai masalah publik yang harus ditangani dengan tepat sasaran dan diharuskan memberikan solusi yang cepat juga, maka dari itu analisis *stakeholders* dibutuhkan. Bryson and Crosby (1992) dalam Bryson (2004:24) analisis *stakeholders* juga digunakan untuk memilih para *stakeholders* dengan tepat dalam

mencari dan menyelesaikan masalah yang membuat para *stakeholders* ikut masuk dalam permasalahan yang ada dan menemukan cara yang efektif dalam menyelesaikan masalah publik.

Stakeholders primer ini memiliki ketertarikan berdasarkan tupoksi dan ruang lingkup kerja masing-masing dimana setiap ketertarikan memiliki pengaruh yang positif maupun negatif dalam pengelolaan dan pengembangan Candi Gedongsongo. Meltser 1972^{etc} dalam Bryson (2004:25) *stakeholders* primer haruslah *stakeholders* yang memiliki perhatian khusus atau prioritas khusus dalam menyelesaikan sebuah permasalahan. Dalam penelitian ini, *stakeholders* primer adalah mereka yang menjadikan pengembangan obyek wisata Candi Gedongsongo sebagai kepentingan utama dan berusaha memberikan kemampuan mereka dalam mengelola dan mengembangkan obyek wisata Candi Gedongsongo.

Berdasarkan tabel 4.1 *stakeholders* primer terdapat Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang, Perum Perhutani Jawa Tengah, BPCB Jawa Tengah, Kelompok Juru Parkir, Pedagang, dan Penyewa Kuda (Warga Sekitar) di Candi Gedongsongo. *Stakeholders* primer ini memiliki ketertarikan berdasarkan tupoksi dan ruang lingkup kerja masing-masing dimana setiap ketertarikan memiliki pengaruh yang positif maupun negatif dalam pengelolaan dan pengembangan Candi Gedongsongo, seperti halnya:

1. Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang

Pengembangan obyek wisata Candi Gedongsongo oleh Pemerintah Daerah diserahkan kepada Dinas Pariwisata berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi,

Tata Kerja, dan Perincian Tugas Perangkat Daerah Kabupaten Semarang. Urusan kepariwisataan yang menjadi tugas wewenang Dinas Pariwisata berdasarkan Peraturan Bupati (PERBUP) pasal 48 (1) disebutkan bahwa tugas dari dinas terkait adalah membantu bupati dalam mengurus kepariwisataan adanya legitimasi ini tetap mewajibkan Dinas Pariwisata untuk melaporkan kinerja mereka dalam mengembangkan obyek wisata termasuk Candi Gedongsongo

Pengelolaan obyek wisata yang dilakukan oleh dinas memberi dampak positif bagi Candi Gedongsongo hal ini disebabkan dengan adanya keinginan untuk terus mengelola obyek menjadikan pacuan supaya Candi Gedongsongo dapat terus berkembang dan bersaing dengan obyek wisata yang lain. Pengelolaan yang baik pasti tidak lepas dari pengembangan, baik pengembangan sarana maupun prasarana. Dinas Pariwisata sendiri sejak tahun 2015 telah melakukan kerjasama oleh dinas lain yang termasuk dalam Perjanjian Kerjasama Nomor 415.4/01.1/KJS/2015 atau biasa disebut dengan Perjanjian Triparti, dalam melakukan pengembangan obyek wisata Candi Gedongsongo pada pasal 7 (1 dan 2) dijelaskan bahwa Dinas Pariwisata memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi dalam mengelola dan mengembangkan Candi Gedongsongo. Apabila dilihat dari hak dan kewajiban dan dikaitkan dengan ketertarikan dari dinas ini, memang hak dan kewajibannya sudah terpenuhi, hanya saja masih terdapat sedikit masalah dengan koordinasi antar pihak lain. Obyek wisata Candi Gedongsongo secara tidak langsung dinas juga ikut membuka lapangan

pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Masyarakat diberikan peluang usaha untuk meningkatkan pendapatan mereka.

Adanya obyek wisata Candi Gedongsongo memang memberikan tambahan pendapatan bagi daerah. Peningkatan pendapatan ini dapat dikatakan memberikan pengaruh positif dan negatif. Positif dalam peningkatan pendapatan daerah ini memberikan semangat untuk terus meningkatkan pengunjung yang berdatangan dengan memberikan berbagai macam pengembangan di Candi Gedongsongo tetapi pengaruh negatifnya hanya berbeda sangat tipis. Adanya target dalam pendapatan daerah ini terkadang melupakan dinas terkait untuk tetap mementingkan manusianya sehingga tujuan dalam pengembangan Candi Gedongsongo hanya berdasarkan harus mencapai target pendapatan yang sudah ditetapkan.

2. BPCB Jawa Tengah

Candi Gedongsongo merupakan obyek wisata yang terkenal dengan peninggalan sejarahnya. Peninggalan sejarah yang menjadi daya tarik wisata adalah candi itu sendiri. Candi yang berada di kawasan wisata Candi Gedongsongo merupakan peninggalan asli yang harus dijaga sebagai aset budaya. BPCB adalah pihak yang diberikan wewenang untuk mengelola dan menjaga aset budaya tersebut. Apabila dilihat dari Perjanjian Kerjasama Nomor 197/101.SP/BPCB/P.I/2015 pada pasal 8 (1 dan 2) hak dan kewajiban dari BPCB adalah memenuhi kebutuhan dan perawatan candi yang ada. Menjaga peninggalan sejarah jelas memberikan dampak positif bagi pengelolaan dan pengembangan Candi Gedongsongo karena dengan

dijaganya peninggalan yang ada candi yang ada menjadi lebih terawat sehingga sampai sekarang masih dapat dinikmati oleh banyak orang.

3. Perum Perhutani Jawa Tengah

Pengelolaan dan pengembangan Candi Gedongsongo melibatkan Perum Perhutani Jawa Tengah dalam pengelolaan dan pengembangan hutan yang masih asli di sekitar kawasan Candi Gedongsongo. Pengelolaan hutan yang ada disekitar obyek tidak dapat dilakukan secara sembarangan karena nantinya akan merusak ekosistem yang sudah ada di sekitar hutan maka dari itu pengelolaannya harus berdasarkan pengetahuan dan peraturan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Disamping pengelolaan hutan, hutan tersebut dapat digunakan untuk daya tarik tersendiri. Walaupun memang sampai saat ini belum terdapat pelaksanaan lebih lanjut tentang pengembangan potensi hutan tetapi hal ini jelas nantinya akan memberikan dampak positif pada obyek wisata Candi Gedongsongo.

Hak dan kewajiban dari Perum Perhutani apabila dilihat dari Perjanjian Kerjasama Nomor 005/PKS/KBM-WJL/I/2015 pada pasal 9 (1 dan 2) antara hak dan kewajiban dengan ketertarikan apabila di tarik garis lurus memang sudah sesuai, tetapi pada kenyataannya sampai saat ini atau setelah perjanjian itu dibuat hingga tahun ini Perum Perhutani belum melakukan suatu pengembangan apapun. Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan, sejauh ini yang dilakukan Perum Perhutani hanyalah sebatas mengecek keadaan villa (karena Perhutani memiliki villa di dalam kawasan

wisata Candi Gedongsongo) walaupun tetap mengikuti koordinasi antar pihak apabila ada pengembangan yang akan dilakukan oleh pihak lain.

Pengelolaan dan pengembangan hutan di sekitar obyek tetap harus menjaga kelestarian hutan seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya karena apabila dilakukan secara sembarangan dapat merusak ekosistem. Namun, ternyata karena harus menjaga kelestarian hutan ini memberikan dampak negatif. Dinas terkait yang bertugas melakukan pengelolaan dan pengembangan hutan di sekitar obyek wisata Candi Gedongsongo sedikit kesulitan karena dalam menjaga hutan terdapat beberapa larangan dalam pelaksanaannya dan tentu saja hal ini akan menghambat pengembangan yang ada.

4. Kelompok Juru Parkir, Pedagang, dan Penyewa Kuda (Warga Sekitar) di Candi Gedongsongo

Selain ketiga *stakeholders* diatas terdapat kelompok yang ikut andil dalam pengelolaan dan pengembangan di Candi Gedongsongo. Kelompok Juru Parkir, Pedagang, dan Penyewa Kuda yang setiap harinya berada di kawasan wisata tentu mengikuti kegiatan pengelolaan dan pengembangan walaupun mereka tidak dapat melakukan pengembangan seperti ketiga *stakeholders* lain mereka tetap dapat melakukan pengelolaan Candi Gedongsongo. Kelompok ini merupakan warga sekitar kawasan wisata yang secara tidak langsung merasa memiliki Candi Gedongsongo karena berada di desa mereka. Rasa kepemilikan ini membuat warga sekitar ikut menjaga dan mengelola Candi Gedongsongo tetapi sayangnya rasa kepemilikan ini juga ikut menghambat pengembangan yang ada karena rasa memiliki ini,

masyarakat cenderung ingin diberi kebebasan dalam melaksanakan kegiatan mencari nafkah mereka disana. Kemudian dengan alasan tersebut warga menginginkan lapangan pekerjaan yang lebih dari para *stakeholders*.

Freeman (1984) dalam Reed (2009) memberikan definisi *stakeholders* sebagai pihak yang terpengaruh oleh kebijakan dan pihak yang dapat mempengaruhi kebijakan. *Stakeholders* sekunder dalam penelitian ini adalah pihak yang dapat ikut memberikan ide atau pengaruh kepada pihak lain tetapi mereka juga dapat dipengaruhi oleh *stakeholders* primer. Menurut Stone 1997etc dalam Bryson (2004:26) menyatakan tidak semua *stakeholders* harus ikut dilibatkan tetapi *stakeholders* primer/kunci harus ikut dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Dalam penelitian ini dapat diartikan bahwa *stakeholders* sekunder adalah pihak-pihak yang tidak selalu ikut dalam pengembangannya atau lebih tepatnya cenderung mengikuti *stakeholders* primer.

Berdasarkan tahapan *stakeholders* pada tabel 4.1 ketertarikan *stakeholders* primer memiliki perbedaan begitupula dengan *stakeholders* sekunder ketertarikan mereka pasti memiliki sisi negatif dan positif bagi pengelolaan dan pengembangan Candi Gedongsongo seperti halnya:

5. Pegawai Pengelola Tiket Candi Gedongsongo

Tugas seorang pegawai jelas memberikan pelayanan yang terbaik apalagi jika berhubungan dengan masyarakat. Pegawai pengelola tiket yang ada di Candi Gedongsongo dituntut untuk selalu memberikan pelayanan yang baik kepada semua pengunjung yang datang di Candi Gedongsongo. Selain itu,

pegawai pengelola tiket juga ikut andil dalam pengelolaan obyek wisata dan terkadang sebagai jembatan penghubung antara dinas dan masyarakat karena pegawai pengelola tiket setiap hari berada di obyek yang mau tak mau akan terus bersama dengan warga sekitar.

6. Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Semarang

Dinas lain yang ikut membantu dalam memberikan dukungan dalam pengelolaan dan pengembangan Candi Gedongsongo adalah Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (BARENLITBANGDA). Dinas ini memiliki kewenangan untuk memeriksa pengembangan apa saja yang akan dilakukan sehingga dana yang akan diberikan nanti memang sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Sesuai dengan PERBUB Nomor 52 Tahun 2016 pasal 51, dimana badan ini melaksanakan fungsi penunjang perencanaan, penelitian dan pengembangan. Penunjang perencanaan dan pengembangan ini diwujudkan dengan adanya dukungan pada pengembangan obyek wisata Candi Gedongsongo yang memberikan pengaruh positif tetapi dinas ini juga diwajibkan untuk menilai apakah pengembangan yang dilakukan itu memang dibutuhkan (*urgent*) atau tidak sehingga apabila kebutuhan tersebut tidak terlalu penting maka tidak disetujui hal ini memberikan dampak negatif dan positif yang bersamaan karena memang hal ini dapat melakukan peng-efektivitasan dana tetapi negatifnya adalah kita tidak mengetahui apabila kedepannya ternyata

pengembangan itu dibutuhkan tetapi tidak dapat dilaksanakan karena ada peng-efektivitasan tersebut.

7. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang

Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2016 pasal 35 tentang tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum sebagai dinas yang diberikan wewenang dalam urusan pekerjaan umum dan penataan ruang menjadikan dinas ini sebagai dinas yang ikut andil dalam pengembangan. Pengembangan yang dilakukan pada Candi Gedongsongo tidak boleh sembarangan karena itu harus melalui DPU sebagai dinas yang mengatur penataan ruang. Sebelum pengembangan Candi Gedongsongo, Dinas Pariwisata sebelumnya diharuskan membuat *Details Engineering Design* (DED) yang digunakan sebagai patokan dalam pelaksanaan pengembangan. DED tersebut kemudian diajukan kepada Dinas Pekerjaan Umum (DPU) untuk dilihat apakah dengan rencan apengembangan tersebut dapat memiliki dampak buruk atau tidak, atau dapat dilaksanakan atau tidak. Sehingga DPU sendiri termasuk dalam *stakeholders* sekunder karena sifatnya hanya membantu.

2. Pengaruh dan Kepentingan *Stakeholder*;

Tahapan kedua adalah tabel yang menunjukkan pengaruh dan kepentingan *stakeholders* dalam pengeloaan dan pengembangan obyek wisata Candi Gedongsongo. Bryson (2004:34) pangaruh dan kepentingan *stakeholders* digunakan untuk melihat dimana *stakeholders* ditempatkan dan bagaimana pengaruh serta kepentingan mereka. Indikasi ini dilakukan untuk melihat kemampuan mereka dalam melaksanakan tugasnya. Pada penelitian ini tabel 4.2

dibuat untuk melihat dimana para *stakeholders* berada dalam pengembangan obyek wisata Candi Gedongsongo, bagaimana pengaruh serta kepentingan mereka dalam melaksanakan tugasnya mengembangkan Candi Gedongsongo. Tabel ini berfungsi untuk membantu membuat rencana kedepannya berdasarkan *stakeholders* yang memiliki pengaruh dan kepentingan yang stabil.

Tabel 4.2 Tabel Pengaruh dan Kepentingan *Stakeholders*

 RENDAH KEPENTINGAN TINGGI	A	B	<i>Stakeholders Primer</i> <ol style="list-style-type: none"> 1. DISPARTA Kabupaten Semarang 2. Perum Perhutani Jawa Tengah 3. BPCB Jawa Tengah 4. Kelompok Juru Parkir, Pedagang, dan Penyewaan Kuda (Warga Sekitar) di kawasan wisata Candi Gedongsongo <i>Stakeholders Sekunder</i> <ol style="list-style-type: none"> 5. Pegawai Pengelola Tiket Candi Gedongsongo 6. BARENLITBANGDA Kabupaten Semarang 7. DPU Kabupaten Semarang
	2 5	4 1 3	
	D	C	
		6 7	
	RENDAH	TINGGI	
	RENDAH	TINGGI	

Sumber: Jurnal *Project Cycle Management, Tearfund Roots Resources*

Pada tahap kedua terdiri dari empat kotak yaitu kotak A, B, C, dan D dimana setiap *stakeholders* yang berada didalamnya memiliki peran yang berbeda-beda. Kotak A berisi *stakeholders* dengan kepentingan tinggi dan pengaruh rendah, Kotak B adalah *stakeholders* yang memiliki keseimbangan antara pengaruh dan kepentingan, Kotak C berisi *stakeholders* yang menjadi kebalikan dari Kotak A yaitu memiliki pengaruh tinggi dengan kepentingan rendah, yang terakhir adalah Kotak D dimana *stakeholders* memiliki pengaruh dan kepentingan yang rendah sehingga dibutuhkan pengawasan khusus. Kotak A diisi

oleh Perum Perhutani Jawa Tengah dan Pegawai Pengelola Tiket Candi Gedongsongo. Kotak B diisi Warga Sekitar yang diwakili oleh juru parkir, pedagang, dan penyewaan kuda, kemudian Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang dan BPCB Jawa Tengah. Pada kotak C terdapat BARENLITBANGDA Kabupaten Semarang dan DPU Kabupaten Semarang.

KOTAK A: Didalamnya terdapat angka 2 dan 5 yang berarti Perum Perhutani Jawa Tengah dan Pegawai Pengelola Tiket berada ditingkat yang sama. Perum Perhutani Jawa Tengah memiliki kepentingan yang lebih dibandingkan dengan Pegawai Pengelola Tiket dan juga memiliki pengaruh yang lebih tinggi. Kotak ini menunjukkan bahwa yang berada didalamnya memiliki kepentingan yang tinggi tetapi pengaruh yang kurang.

Kepentingan dari Perum Perhutani adalah mereka harus menjaga hutan tetapi tetap harus melakukan pengembangan sayangnya kepentingan itu tidak diimbangi dengan pengaruh yang baik sehingga dalam pelaksanaan Perum Perhutani tidak dapat mempengaruhi *stakeholders* lain dengan baik dan belum melaksanakan pekerjaannya dengan baik pula. Sedangkan untuk pegawai pengelola tiket mereka jelas memiliki kepentingan yang tinggi selain diharuskan memberikan pelayanan yang baik,

Candi Gedongsong merupakan tempat kerja mereka dibawah Dinas Pariwisata tetapi sama seperti Perum Perhutani mereka tidak memiliki pengaruh yang cukup tinggi, hanya sekedar memberikan ide dalam rencana pengembangan saat pengembangan akan dilaksanakan.

KOTAK B: berada didalam kotak ini menunjukkan bahwa yang berada didalamnya memiliki pengaruh yang cukup baik dan juga kepentingan yang tinggi. Dalam penelitian ini *stakeholders* yang berada didalam kotak ini adalah nomor satu, tiga, dan empat yang berarti Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang, BPCB Jawa Tengah, dan Kelompok Juru Parkir, Pedagang, dan Penyewaan Kuda (Warga Sekitar) adalah penghuninya.

Dinas Pariwisata berada dalam kotak ini dikarenakan dinas ini memiliki kepentingan yang tinggi yang jelas karena Candi Gedongsongo berada dalam ruang lingkup pekerjaan mereka. Hal ini sudah menjadikan Candi Gedongsongo sebagai prioritas pekerjaan bagi Dinas Pariwisata. Selain itu, dengan menjadikannya prioritas dinas ini memiliki keunggulan dalam rangka mempengaruhi *stakeholders* lain dalam melaksanakan pengelolaan dan pengembangan Candi Gedongsongo.

Sedangkan untuk BPCB Jawa Tengah sendiri sebagai penjaga peninggalan budaya jelas Candi Gedongsongo harus dijaga dan dikelola dengan benar sehingga aset yang ada dapat terus dinikmati bersama. Walaupun tingkat pengaruh terhadap *stakeholders* lain lebih rendah dibandingkan Dinas Pariwisata tetapi dengan pemegang pengelola peninggalan budaya menjadikan mereka memiliki pengaruh yang cukup dalam pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan Candi Gedongsongo.

Warga sekitar sendiri memiliki kepentingan yang cukup tinggi setara dengan Dinas Pariwisata karena Candi Gedongsongo merupakan tempat dimana mereka mencari nafkah dan meningkatkan pendapatan, dan untuk pengaruhnya

walaupun tidak dapat melaksanakan pengembangannya tetapi warga sekitar memiliki pengaruh dalam pengembangan karena pengembangan yang dilakukan oleh dinas-dinas lain juga harus melibatkan keinginan warga sekitar.

KOTAK C: penghuni didalam kotak ini adalah nomor enam dan tujuh yang menjadikan BARENLITBANGDA dan DPU sebagai penghuninya. Memiliki kepentingan dan pengaruh yang tidak jauh beda walaupun BARENLITBANGDA lebih unggul satu tingkat baik dalam pengaruh maupun kepentingan.

BARENLITBANGDA memiliki kepentingan dan pengaruh yang lebih tinggi karena mereka memiliki kewenangan dalam memberikan dana kepada Dinas Pariwisata dalam melakukan pengelolaan dan pengembangan. Sedangkan untuk DPU sendiri mereka cenderung hanya sebagai pemberi saran dan tempat konsultasi bagi Dinas Pariwisata apabila mereka melakukan pembuatan DED sebelum melaksanakan pengembangan di Candi Gedongsongo.

3. Identifikasi Peran *Stakeholders*

Tahapan yang terakhir ini adalah tahapan dimana ditentukannya peran *stakeholders* dalam pengelolaan dan pengembangan Candi Gedongsongo. Setelah sebelumnya dijabarkan bagaimana peran setiap *stakeholders* berdasarkan tahapan pelaksanaan kegiatan maka terdapat sebuah kesimpulan dari data-data tersebut.

Tabel 4.3 Tabel Identifikasi Peran *Stakeholders*

		Jenis Peran			
		Informan	Konsultan	Kerjasama	Kontrol
Tahapan dalam Pengembangan	Identifikasi	DISPARTA Kabupaten Semarang	DISPARTA Kabupaten Semarang	DISPARTA Kabupaten Semarang	DISPARTA Kabupaten Semarang
		Perum Perhutani Jawa Tengah	Dinas Pekerjaan Umum	Perum Perhutani Jawa Tengah	Perum Perhutani Jawa Tengah
		BPCB Jawa Tengah	BARENLITB ANGDA Kabupaten Semarang	BPCB Jawa Tengah	BPCB Jawa Tengah
	Desain	DISPARTA Kabupaten Semarang	DPU Kabupaten Semarang	DISPARTA Kabupaten Semarang	DISPARTA Kabupaten Semarang
		Perum Perhutani Jawa Tengah	BARENLITB ANGDA Kabupaten Semarang	Perum Perhutani Jawa Tengah	DPU Kabupaten Semarang
		BPCB Jawa Tengah		BPCB Jawa Tengah	BARENLITB ANGDA Kabupaten Semarang
		DPU Kabupaten Semarang		Kelompok Juru Parkir, Pedagang, dan Penyewaan Kuda (Warga Sekitar) Candi Gedongsongo	
	Implementasi dan Pengawasan	DISPARTA Kabupaten Semarang	DISPARTA Kabupaten Semarang	DISPARTA Kabupaten Semarang	DISPARTA Kabupaten Semarang
		Perum Perhutani Jawa Tengah	Perum Perhutani Jawa Tengah	Perum Perhutani Jawa Tengah	
BPCB Jawa Tengah		BPCB Jawa Tengah	BPCB Jawa Tengah		

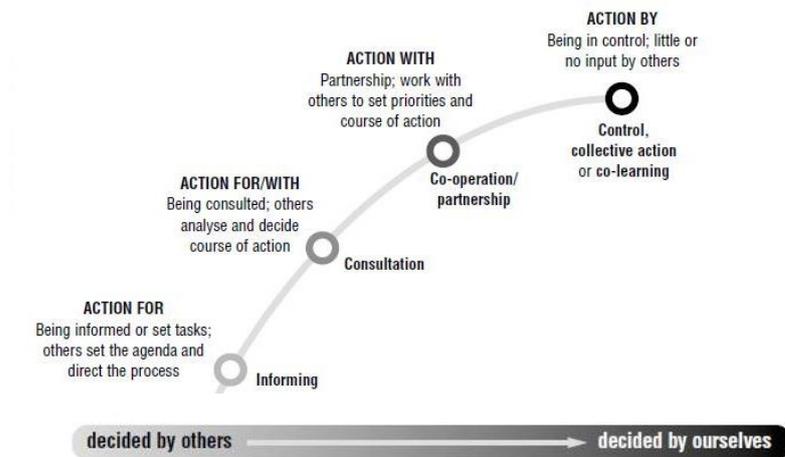
Jenis Peran				
	Informan	Konsultan	Kerjasama	Kontrol
	BARENLITB ANGDA Kabupaten Semarang	Kelompok Juru Parkir, Pedagang, dan Penyewaan Kuda (Warga Sekitar) Candi Gedongsongo	Kelompok Juru Parkir, Pedagang, dan Penyewaan Kuda (Warga Sekitar) Candi Gedongsongo	
Tinjauan	DISPARTA Kabupaten Semarang BARENLITB ANGDA Kabupaten Semarang	DISPARTA Kabupaten Semarang	DISPARTA Kabupaten Semarang Pegawai Pengelola Tiket Candi Gedongsongo Kelompok Juru Parkir, Pedagang, dan Penyewaan Kuda (Warga Sekitar) Candi Gedongsongo	DISPARTA Kabupaten Semarang
Evaluasi	DISPARTA Kabupaten Semarang Perum Perhutani Jawa Tengah BPCB Jawa Tengah	DISPARTA Kabupaten Semarang Perum Perhutani Jawa Tengah BPCB Jawa Tengah	DISPARTA Kabupaten Semarang Perum Perhutani Jawa Tengah BPCB Jawa Tengah Pegawai Pengelola Tiket Candi Gedongsongo	DISPARTA Kabupaten Semarang

Sumber: Jurnal *Project Cycle Management, Tearfund Roots Resources*

Tabel 4.3 telah mengelompokkan para *stakeholders* berdasarkan jenis perannya disetiap tahapan pengembangan. Eden and Ackerman (1998:133) dalam Bryson (2004:42) menunjukkan bagaimana keterlibatan setiap *stakeholders* pasti berbeda, ada pihak yang hanya ikut dalam beberapa tahapan saja tetapi ada juga pihak yang mengikuti semua tahapan dan termasuk dalam semua jenis peran. Pihak yang ikut banyak peran memiliki keuntungan tersendiri yaitu meningkatkan pengaruh pihaknya kepada pihak lain.

Berdasarkan tabel 4.3 Dinas pariwisata menjadi *stakeholders* yang paling sering terlibat dalam pengembangan obyek wisata Candi Gedongsongo. Hal ini ditunjukkan pada tabel 4.3, Dinas Pariwisata memiliki keterlibatan hampir di setiap tahapan peran di semua tahap pengembangan. Dimulai dari menjadi informan di semua jenis peran pada tahap identifikasi pengembangan, kemudian menjadi informan, kerjasama dan pengawas/kontrol pada tahap desain saat penyusunan rencana pengembangan Candi Gedongsongo. Pada tahap implementasi dan pengawasan, Dinas Pariwisata berada di semua jenis peran. Tahap tinjauan-pun dinas ini selalu berada di semua jenis perannya. Pada tahap pengembangan terakhir yaitu evaluasi, Dinas Pariwisata juga menjadi pihak yang selalu ikut terlibat dalam evaluasi. Kesimpulannya adalah Dinas Pariwisata menjadi *stakeholders* yang berada pada tahap *decided by ourself* yang berarti dinas ini memiliki pengaruh yang lebih dan kepentingan yang tinggi dibandingkan dengan enam *stakeholders* lain yang juga sebagai *stakeholders* dalam pengembangan obyek wisata Candi Gedongsongo.

Gambar 4.1
Tingkat Peran



Sumber: Jurnal *Project Cycle Management, Tearfund Roots Resources*

Berdasarkan gambar 4.1 dapat dilihat setiap peran memiliki arti tersendiri. Peran yang aktif memberikan banyak keuntungan dan jaminan kesuksesan sebuah program, namun mengikutsertakan keterlibatan semua *stakeholders* atau kelompok terkait tidaklah mudah karena membutuhkan banyak waktu dan memungkinkan adanya sebuah konflik karena perbedaan kepentingan. Blackman dalam Jurnal *Project Cycle Management, Tearfund Roots Resources* (2003:27) partisipasi terdiri dari dua *stakeholders* atau lebih yang bersama-sama berbagi pemikiran dalam membuat keputusan. *Stakeholders* primer biasanya memiliki tantangan tersendiri untuk mempengaruhi pihak lain dengan kemampuannya. Pada tabel 4.3 dijelaskan bagaimana peran setiap *stakeholders* berdasarkan tahapan pelaksanaan kegiatan pengembangan. Pada tabel tersebut dijelaskan setiap tahap pengembangan memiliki empat jenis keterlibatan peran dimana setiap partisipasi

memiliki arti tersendiri. Gambar 4.1 menjelaskan tingkatan peran yang ada di tabel 4.3.

Tingkatan peran terendah adalah Informasi (*Informing*) dimana peran ini menjadikan *stakeholders* sebagai sumber informasi dalam setiap tahapan dalam pengembangan obyek wisata Candi Gedongsongo. Kemudian diatas peran informasi terdapat jenis peran Konsultan (*Consultation*) jenis peran ini adalah menjadikan pihak-pihak terkait sebagai pihak yang dapat dijadikan konsultan dalam rangka mengembangkan obyek wisata Candi Gedongsongo supaya pengembangan yang dilakukan sesuai dengan kondisi dan tidak merusak ekosistem yang sudah ada sebelumnya. Tingkatan peran yang ketiga adalah kerjasama (*partnership*), peran ini mewajibkan semua kelompok / *stakeholders* yang ada saling bekerjasama untuk menentukan mana prioritas kebutuhan yang harus dipenuhi terlebih dahulu, dalam penelitian ini berarti ketujuh *stakeholders* yang ada harus saling berkoordinasi manakah kebutuhan pengembangan Candi Gedongsongo. Tingkatan peran yang terakhir yang berarti menjadi tingkatan peran tertinggi adalah Kontrol (*Control*), *stakeholders* ini menjadi *stakeholders* yang mengawasi dan mengontrol jalannya pengembangan obyek wisata Candi Gedongsongo agar sesuai dengan rencana dan DED yang sudah ditetapkan dan tidak menyimpang apabila terjadi konflik dan kepentingan-kepentingan diluar kegiatan.

Peran *stakeholders* dalam pengembangan obyek wisata Candi Gedongsongo jelas berbeda satu sama lain semua tergantung bagaimana posisi mereka dalam pengembangan tersebut dan bagaimana mereka ikut andil dalam

pengelolaan obyek wisata Candi Gedongsongo. Jurnal *Stakeholders Analysis and Management*,

4.2 Jejaring Kebijakan Dalam Pengembangan Obyek Wisata Candi Gedongsongo di Kabupaten Semarang

Jejaring kebijakan yang merupakan hubungan para aktor menjadi hal penting dalam penelitian ini. Warden (1992) dalam jurnal Jejaring Kebijakan Dalam Perencanaan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Brantas Terpadu (2012:50) Jejaring kebijakan adalah suatu hubungan yang terbentuk akibat koalisis diantara aktor pemerintah, dan masyarakat termasuk privat. Sedangkan menurut Sawitri (2008) dalam Ifah (2012:50) jejaring kebijakan pada perumusan kebijakan memberi kontribusi terhadap perubahan tujuan dengan kemunculan aktor-aktor yang sarat dengan nilai-nilai motivasi dan kepentingan. Dalam penelitian ini jejaring kebijakan yang dimaksud adalah hubungan antar *stakeholders* yang terjalin dalam pengembangan obyek wisata Candi Gedongsongo dimana saat ini hubungan *stakeholders* tersebut terikat oleh perjanjian yang biasa disebut dengan Perjanjian Tripartit. Perjanjian ini mengikat tiga pihak *stakeholders* yaitu Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang, BPCB Jawa Tengah, Perum Perhutani Jawa Tengah. Jejaring kebijakan tidak hanya dilihat dari hubungan antar *stakeholders* yang terkait saja tetapi juga dapat dilihat melalui efektifitas peran *stakeholders* yang dilakukan pada saat *stakeholders* melakukan kegiatan dalam pengembangan obyek wisata Candi Gedongsongo.

Jenis jejaring kebijakan yang digunakan adalah jejaring kebijakan Koalisi Advokasi yang berarti jejaring yang terdaat kelompok-kelompok organisasi

maupun perorangan yang bekerja sama untuk mencapai perubahan dalam kebijakan hukum atau program. Pada penelitian ini jejaring kebijakan yang ada dalam pengembangan obyek wisata Candi Gedongsongo berdasarkan Koalisi Advokasi yang bersifat *universal* masih memiliki kekurangan. Hubungan antar aktor memang baik tetapi koordinasi antar aktor dirasa masih perlu perhatian khusus. Dalam Perjanjian Kerjasama Nomor 415.4/01.1/KJS/2015 pada bab 1 pasal 1 dijelaskan maksud kerjasama ini adalah untuk mensinergikan dan memadukan pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Semarang. Tujuan dari kerjasama ini adalah secara bersama-sama ikut berperan dalam pengelolaan obyek wisata Candi Gedongsongo beserta situs Gedongsongo secara terpadu dan melakukan bagi hasil dari pengelolaan retribusi masuk obyek wisata Candi Gedongsongo beserta Situs Gedongsongo.

Peran pemerintah dalam mengelola dan mengembangkan pariwisata secara garis besar menyediakan infrastuktur yang tidak hanya dalam bentuk fisik, memperluas berbagai bentuk fasilitas, kegiatan koordinasi para aparatur pemerintah dengan pihak lain, pengaturan dan promosi umum ke daerah lain maupun ke luar negeri. Pemerintah mempunyai otoritas dalam pengaturan, penyediaan, dan peruntukan berbagai hal terkait dengan kebutuhan pariwisata. *Stakeholders* juga dapat menentukan mau dibawa kemana potensi yang ada dalam obyek wisata.

Peran masyarakat juga diperlukan dalam mengembangkan pariwisata ntuk menjamin pelaksanaannya diperlukan suatu wadah, lembaga, atau badan hukum untuk mengelola dan memanfaatkannya sebagai suatu *tourist attraction*

(Suwantoro, 2004:85). Peran serta masyarakat dapat terwujud karena manfaatnya dapat dirasakan secara langsung dengan terbukanya lapangan pekerjaan dan usaha jasa wisata yang secara tidak langsung dapat meningkatkan pendapatan mereka.

Perlunya keterlibatan pemerintah dan masyarakat dalam pengembangan obyek wisata Candi Gedongsongo yang pada penelitian ini membahas tentang bagaimana hubungan kedua pihak tersebut yang memiliki peran berbeda tetapi dalam pengembangan obyek wisata Candi Gedongsongo harus saling membantu satu sama lain.

Jejaring kebijakan dalam Pidato Pengukuhan oleh Sri Suwitri, jejaring kebijakan terbentuk melalui komunikasi bermanfaat untuk:

- 1) Mempelajari peran masyarakat dalam kebijakan publik ; dan
- 2) Menemukan jati diri organisasi dalam dinamika *governance* yang kompleks.

Jadi, jejaring kebijakan sangat dibutuhkan dalam suatu pengembangan obyek wisata, terutama obyek wisata Candi Gedongsongo karena pengelolaan dan pengembangannya melibatkan lebih dari satu dinas.

Menurut Moore (1995:112) secara umum aktor yang terlibat dalam perumusan kebijakan publik yaitu, aktor publik, aktor privat dan aktor masyarakat (*civil society*). Ketiga aktor ini sangat berperan penting dalam sebuah proses penyusunan kebijakan publik. Selanjutnya Lindblom dalam Agustino (2008:41) menyebutkan aktor pembuat kebijakan, dalam sistem pemerintahan demokratis, merupakan interaksi antara dua aktor besar, yaitu *Inside Government Actor* (IGA) dan *Outside Government Actors* (OGA). Para aktor pembuat kebijakan ini terlibat

sejak kebijakan publik itu masih berupa isu dalam *agenda setting* hingga proses pengambilan keputusan berlangsung. Penelitian ini kedepannya diharapkan dapat dijadikan sebuah saran dari dibuatnya kebijakan baru yang dapat mengatur tentang jejaring kebijakan.

Berdasarkan tahapannya kebijakan publik terdiri dari beberapa tahapan salah satunya adalah Formulasi Kebijakan. Formulasi kebijakan publik adalah rangkaian proses pembuatan sebelum menetapkan sebuah kebijakan untuk diimplementasikan. Formulasi sendiri menjadi sasaran utama dalam memecahkan masalah dengan berbagai macam alternatif. Permasalahan yang mendesak nantinya akan dimasukkan kedalam agenda setting kebijakan publik. Jejaring kebijakan saat ini memang masih dirasa baik-baik saja tanpa adanya kebijakan khusus walaupun sudah terdapat perjanjian khusus yang dibuat oleh ketiga pihak terkait.

Awal hubungan antar *stakeholders* yang terjadi dalam pengembangan obyek wisata Candi Gedongsongo didasari oleh perjanjian yang ditetapkan oleh Keputusan Bupati yaitu adanya tiga *stakeholders* yang saling membantu dalam pengelolaan dan pengembangan obyek wisata Candi Gedongsongo. Saat ini hubungan antar *stakeholders* atau jejaring yang ada sudah mengikat tujuh *stakeholders* untuk ikut andil dalam pengelolaan serta pengembangan. Adanya jejaring ini menyebabkan pembagian wilayah pengelolaan dan pengembangan oleh beberapa pihak. Berdasarkan perjanjian kersajasama Nomor 415.4/01.1/KJS/2015, pihak kesatu adalah Pemerintah Kabupaten Semarang yang diwakilkan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang, pihak kedua adalah

BPCB Jawa Tengah dan pihak ketiga adalah Perum Perhutani Jawa Tengah. Pembagian wilayah pengelolaan dan pengembangan berdasarkan Pasal 7-9 menyebutkan Pihak Kesatu berkewajiban (a) menata lokasi wisata kolam rendam air panas; (b) memelihara jalan, penerangan, taman, saluran air dan talud di Kawasan Candi Gedongsongo; (c) sebagai koordinator dalam penataan pedagang, Pedagang Kaki Lima (PKL), jasa kuda di Kawasan Candi Gedongsongo. Pihak Kedua berkewajiban (a) memelihara bangunan Candi Gedongsongo; (b) melakukan penataan taman, saluran jalan, serta penghijauan di Zona Inti Candi Gedongsong; (c) berpartisipasi dalam penataan pedagang Pedagang Kaki Lima (PKL), dan jasa kuda di dalam Zona Inti Candi Gedongsongo. Pihak Ketiga berkewajiban (a) berpartisipasi dalam penataan pedagang, Pedagang Kaki Lima (PKL), dan jasa kuda di dalam kawasan yang dikelola PIHAK KETIGA; (b) mempromosikan kawasan Candi Gedongsong, baik di dalam maupun di Luar Negeri; (d) melakukan penataan taman, saluran, dan jalan di kawasan yang dikelola PIHAK KETIGA; (d) melakukan kegiatan penghijauan dan reboisasi di dalam kawasan Candi Gedongsongo. Pihak Ketiga juga berhak mengelola hutan secara lestari di lokasi kerjasama sesuai tugas dan kewenangannya. Jika hubungan antar *stakeholders* yang terikat masih kurang baik hal ini tak luput juga bagi *stakeholders* yang tidak terikat dengan perjanjian yang ada. Ketiga *stakeholders* lain memiliki koordinasi yang masih kurang sehingga terkadang terjadi ketidak-sinkronan keinginan antar satu *stakeholders* dengan *stakeholders* lainnya.

Jejaring yang ada saat ini secara hubungan memang sudah cukup baik berdasarkan data wawancara yang telah peneliti lakukan, tetapi pada koordinasi

setiap *stakeholders* masih membutuhkan perhatian lebih dari setiap *stakeholders*. Saat ini koordinasi antar *stakeholders* dilakukan apabila akan melakukan pengelolaan ataupun pengembangan saja. Selain itu, saat ini belum ada waktu khusus dalam melakukan koordinasi antar dinas terkait. Perjanjian Tripartite membuat tiga dinas terkait terus menjaga hubungan dan koordinasi dalam melaksanakan pengelolaan dan pengembangan Candi Gedongsongo, apabila satu dinas ingin melakukan pengembangan akan saling berkoordinasi dengan dinas yang lain. Namun, koordinasi ini dilakukan secara mendadak apabila akan ada pengembangan atau proyek sedangkan untuk setiap bulannya belum ada waktu rutin untuk saling melaporkan hasil yang ada. Begitu pula dengan jejaring antara pihak pemerintah dengan masyarakat sekitar. Pemerintah memberikan sosialisasi namun masyarakat tidak ikut serta dalam sosialisasi sehingga sosialisasi yang dilakukan dirasa sia-sia. Sedangkan jejaring kebijakan dalam pengembangan Candi Gedongsongo jika dilihat dari efektivitas peran *stakeholders*nya, jejaring kebijakannya dapat dikatakan masih kurang baik karena efektivitas peran *stakeholders* dalam pengembangan masih belum berjalan dengan baik.

Adanya jejaring kebijakan ini menjadikan pengembangan obyek wisata Candi Gedongsongo berkembang lebih pesat dibandingkan dengan obyek wisata lain yang ada di Kabupaten Semarang namun, hal ini juga menjadi masalah karena koordinasi yang ada dapat dikatakan masih cukup lemah. Dinas Pariwisata sendiri menjadikan Candi Gedongsongo sebagai prioritas pengembangan, hal ini dapat dilihat banyaknya pengembangan yang sudah dilakukan oleh dinas tersebut. BPCB Jawa Tengah dan Perum Perhutani memang tidak dapat melakukan banyak

pengembangan dan dapat dikatakan kedua pihak tersebut tidak menjadikan obyek wisata Candi Gedongsongo sebagai prioritas mereka. Seiring dengan perkembangan jaman dan kebutuhan wisata masyarakat jejaring kebijakan yang berjenis Koalisi Advokasi dan bersifat *universal* ini dapat menambah hubungan dengan *stakeholders* lain supaya pengembangan yang ada lebih baik dan lebih pesat lagi.